

# PILKADA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK PEREMPUAN



**Dr. Imas Sumiati, M.Si**  
Dosen Fakultas Hukum UNPAS Bandung

## Pendahuluan

Pilkada serentak 2018 merupakan hajat besar republik yang harus diapresiasi oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali perempuan yang merupakan pemilih yang cukup besar jumlahnya. Perempuan di samping sebagai pemilih terbesar jumlahnya, juga memiliki kekuatan yang tercerdaskan dalam memilih pemimpin dan tentunya berpihak kepada politik yang bersih, elegan dan terdidik. Selain itu, perempuan memiliki kemampuan yang lebih dari pada pria dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan berpolitik, potensi besar yang *multy tasking* ini harus tergambar pada keberpihakan pada pemimpin atau calon pemimpin yang menggunakan cara-cara yang cerdas dan sehat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan bagian dari prospek demokratisasi yang sedang bergulir di bawah air sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud dari model pengisian pejabat publik oleh masyarakat sehingga akuntabilitasnya kepada pemilik kedaulatan menjadi lebih kongkrit. Pemilihan

kepala daerah secara langsung juga merupakan upaya membuat sistem pengisian jabatan politik menjadi konsisten, mulai dari presiden, kepala daerah (propinsi, kabupaten/kota) sampai kepala desa sudah dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam tulisan ini saya mencoba bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala daerah

secara langsung ini, selama ini perempuan memang telah diakui eksistensinya dalam dunia perpolitikan tanah air tetapi jumlahnya masih sangat sedikit, maksudnya proporsionalitasnya masih rendah, padahal pemilih perempuan mencapai setengah dari jumlah pemilih dalam pemilihan umum, sayangnya angka yang kecil inipun tidak sepenuhnya mewakili kaum perempuan, sebab kita lihat di DPR hanya beberapa saja perempuan bahkan ada yang mendompleng nama suaminya, belum ditambah fenomena yang disebutkan Marwah Daud bahwa mereka belum tentu memiliki prespektif kewanitaan.

### Pembahasan.

Pada tahun 1993 hanya 1,6% dari 122 duta besar yang perempuan, demikian hanya 5.5% dari 15.332 pejabat eselon I dan II departemen kewanitaan dalam pemilihan umum 1992 sebanyak 51% (55.074.772) pemilih perempuan. Dan pada tahun 1997 meningkat menjadi 67% dari jumlah pemilih di Indonesia (124) namun hanya 13, 25% (53 dari 400) kursi diparlemen yang diduduki perempuan, perbandingan ditahun lainnya menunjukkan angka 8,33%(1977), 10%(1982) serta 16.3%, sekarang kuota anggota legislatif untuk perempuan 30% tetapi hanya terisi hanya 11% saja, ternyata perempuan sendiri yang tidak bisa memenuhinya, mengapa ini terjadi? Persoalannya terletak bukan hanya pada diri perempuan tapi banyak penyebabnya, salah satunya relatif kecilnya pelu-

ang jumlah caleg perempuan dalam nomor potensial jadi.

Menurut Devisi perempuan dan pemilu Cetro ( *center for Electoral Reform*) 2004, dari data 4 partai politik (PPP,PAN.PKB dan PKS) yakni dimana PPP jumlah caleg perempuan dalam nomor potensial hanya 15 dari 123 caleg yang dicalonkan, PAN hanya 26 dari 176 caleg yang dicalonkan, PKB hanya 23 dari 140 caleg yang dicalonkan dan PKS hanya 17 dari 216 caleg yang dicalonkan.

Tentu permasalahan itu hanya satu dari banyaknya kenyataan yang akhirnya membuat perempuan harus terjegal dalam perjalanan menjadi wakil rakyat, Cetro dalam siaran 6 Januari 2004 lalu menyatakan kekecewaannya pada partai politik dan komisi pemilihan umum soal komitmen mereka, dalam memajukan keterwakilan perempuan. Hasil Analisis Cetro terhadap 4 partai besar peserta pemilu menunjukkan temuan sbb;

*Pertama* belum ada kesungguhan partai politik untuk meningkatkan perwakilan perempuan, *kedua*, kecil kemungkinan terjadi peningkatan perwakilan perempuan, pada pemilu 2004 di DPR RI. DPRD propinsi dan DPRD kab/kota, *ketiga* sistem pemilu belum akomodatif terhadap kepentingan peningkatan perwakilan perempuan. *Keempat* akibatnya agenda perempuan berupa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan anti kekerasan terhadap perempuan dapat diperjuangkan sebelum pemilu 2009.

Duni politik adalah dunia kekuasaan yang paling kongkrit, disinilah terjadi persaingan, dari mulai tingkat paling lunak sampai paling kasar, dan karena perempuan jarang melewati tahap-tahap berpolitik ini. "etos kerja" politiknya rendah. Politik terlalu sederhana untuk dijadikan pro-pesi karena di dalamnya terdapat sejumlah kepentingan. Politik lebih indah disebut sebagai perjuangan. Di dalamnya ada berbagai nuansa pembelaan terhadap hak-hak orang tertindas, politikus perempuan tak terkecuali, harus melakukan hal serupa.

Paling tidak pembelaan ini diwujudkan dalam bentuk perhatian mereka terhadap nasib perempuan. Suara nyaring dari kelompok ini (politik perempuan) dirasakan masih jarang, paling tidak ada dua kemungkinan realitas ini, pertama, bahwa politikus perempuan lebih mencerminkan cita-cita partainya daripada kepentingan-kepentingan kaum perempuan, kehadiran mereka di parlemen tidak dirasakan sebagai wakil kaum perempuan, sehingga tak ada hal yang mendorong dirinya secara serius dalam memperjuangkan nasib-nasib perempuan, kedua, karena ketidaktahuan wacana perempuan dalam realitas masyarakat, banyaknya anggota perempuan yang tak berlatar belakang politik adalah kendala utama dalam mekanisme dan tata kerja parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Untuk itu maka budaya nepotismen harus benar-benar dihapuskan, dengan kata lain parlu dicar-

ikan perempuan-perempuan yang siap berjuang dan paham wacana perempuan dalam panggung politik.

Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik, namun demikian di tengah budaya dominan perempuan yang bersandar pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan, hal ini dapat dilihat antara lain, dari persentase perempuan yang duduk di posisi tertentu dalam lembaga-lembaga eksekutif. Legislatif dan yudikatif yang masih sangat kecil yaitu dibawah 20% dalam konteks demokrasi, jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan.

Sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada dibawah subordinasi laki-laki, sistem patriarkhi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari baik pada perempuan kelas bawah maupun kelas atas, di rumah, di tempat kerja dan dikomunitas yang lebih luas, wujud dan intensitas subordinasi bervariasi. Namun pada dasarnya sama mengandung salah satu atau lebih unsur-unsur yang merendahkan perempuan seperti, diskriminasi, kurang dihargai, kontrol, pemerasan, penindasan dan kekerasan, celaknya sistem ini diadopsi oleh negara sebagaimana

tercermin dalam undang-undang kebijakan, maupun peraturan-peraturan bermasyarakat dan bernegara

Meskipun UUD<sup>1945</sup> menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination Convention Against Women*, hal ini tidak berarti undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada menjamin kesetaraan. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya adalah Undang-undang perkawinan dan KUHP pasal 285 dan 286 tentang pemerkosaan.

Ormas perempuan yang mempunyai massa luas dan bebas bergerak seperti PKK dan Dharma Wanita selain telah dikontrol oleh pemerintah (seperti halnya, SPSI, HKTI, KNPI dan lain-lain) juga melanggengkan posisi subordinasi perempuan di bawah laki-laki, dalam organisasi ini posisi perempuan sangat tergantung pada laki-laki, artinya dalam konteks hak berserikat, perempuan ditundukkan dua kali yaitu di bawah kontrol negara dan di bawah kontrol laki-laki.

Praktik pembangunan yang berlangsung secara umum selain cenderung tidak melibatkan perempuan dalam posisi yang menentukan, juga telah banyak meminggirkan posisi ekonomi perempuan, ada anggapan bahwa posisi marginal perempuan ditimbulkan oleh perencanaan pembangunan yang mengabaikan/meninggalkan perempuan. Kemudian digalakan program pengintegrasian

perempuan dalam pembangunan yang dikenal dengan WID (*Women-in-Development*). Program WID juga gagal dalam memperbaiki posisi perempuan, intergasi mereka terhadap kerangka institusional yang ada menjadikan posisi mereka justru semakin marginal.

Sebagai kelompok masyarakat yang dalam sejarah secara sistematis terus-menerus ditaklukan, perempuan akhirnya membangun sebuah gerakan perlawanan baik secara individu maupun kolektif, gerakan perempuan adalah gerakan perlawanan terhadap sistem yang menindas dan tidak adil. Gerakan ini justru disetarakan sebagai upaya demokratisasi, unsur-unsur demokratisasi dalam gerakan perempuan bersifat spesifik antara lain sbb:

1. demokrasi bagi kaum perempuan tidak terbatas hanya pada level publik, tetapi juga pada tingkat hubungan personal antar pribadi, gerakan perempuan menurut kesetaraan segal level (*family, community, society, and state*) dan menuntut konsistensi gagasan dan tindakan dalam realitas kehidupan sehari-hari (*democracy in the house and democracy in the country*).
2. definisi kekuasaan yang dikembangkan dalam gerakan perempuan adalah "berbagi" atau kekuasaan bersama-sama (*power with*) dan bukan "menguasai" atau "power over". Maka Political empowerment perempuan

- adalah upaya membangkitkan kesadaran dan kekuatan kolektif.
3. tidak ada khirarkhi kasus atau masalah. Bagi gerakan perempuan isu domestik dan publik sama pentingnya. Soal pemerkosaan oleh suami tidak lebih rendah dari pada soal perebutan kekuasaan negara
  4. gerakan perempuan tidak hanya menuntut kesetaraan gender tetapi juga kesetaraan masyarakat.

Dengan kata lain, gerakan perempuan untuk demokrasi adalah gerakan keadilan yang menyeluruh di segala level dan ruang, yang menuntut perubahan peran laki-laki dan perempuan, sekaligus perubahan struktur kekuasaan dan orientasi pembangunan.

Dari sudut hak dan pengurusan aspek ekonomi perempuan dapat menjalankannya apalagi diatur oleh ajaran Islam, Islam telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang sedemikian rupa pada sisi pertanggungjawaban secara umum dan khusus, kemudian dari segi penuntutan pengetahuan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tanggungjawab tersebut, dari sisi pemberian kesempatan yang seluasnya untuk berjihad serta dari sisi perolehan hak dan warisan, maka sungguh irasional jika kemudian Islam meniadakan hak atas perempuan yang melakukan kontrak (perjanjian) sipil dalam bidang perjualbelian.

Islam membolehkan perempuan untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas hak miliknya itu. Perem-

puan dibolehkan pula mewakili urusannya kepada orang lain, jika ia tidak berkehendak sendiri, dibolehkan pula atasnya untuk menjamin orang lain atau dirinya dijamin orang lain, semua kebolehan itu persis seperti yang diberikan kepada laki-laki hingga karenanya kita tidak pernah menjumpai seorang ahli fiqih Islam pun berpendapat bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan segala tingkah laku keuangan hanya dihususkan bagi laki-laki dan tidak untuk perempuan.

Demikian Islam memberikan derajat kepada perempuan dalam kedudukannya sebagai manusia yang sempurna, kemanusiannya sejak awal nur Islam menyirami bumi.

Sehubungan dengan keterwakilam perempuan dalam dunia politik kita punya harapan besar terhadap keberadaan perempuan dalam pemilihan kepala daerah langsung yang sedang bergulir saat ini di dunia perpolitikan indonesia, bagaimana peluang perempuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini atau dengan kata lain apakah peluang perempuan sebagai pemimpin daerah mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki, mungkin pertanyaan ini harus dijawab oleh penelitian, kita buat sebuah studi kasus di daerah-daerah pemilihan di Indonesia, tetapi paling tidak tulisan ini dapat sedikit menggambarkan keadaan perempuan berdasarkan sejarah masa silam perjuangan perempuan Indonesia.

Adapun mengenai kedudukan perempuan di dalam pandangan Islam, sesungguhnya sudah sangat jelas, sehingga ketika peradaban lain

masih sibuk mendiskusikan mengenai apakah wanita itu sejenis hewan ataukah manusia, Islam justru telah menempatkan wanita pada posisi yang paling tinggi dan penuh adil.

Kalau kita telaah lebih dalam, sesungguhnya hukum-hukum Islam diturunkan kepada manusia dengan melihat sisi kemanusiannya semata. Kalupun sepintas ada perbedaan beban hukum, hal ini bukan berarti Islam memomorsatukan laki-laki dan memomorduakan perempuan, melainkan karena pengakuan terhadap perbedaan yang secara fitrah telah dimiliki keduanya saat mereka diciptakan, dan ini justru makin memperkuat keyakinan bahwa ajaran Islam sangat sesuai dengan sisi kemanusiaan manusia.

Selain itu adanya perbedaan hukum yang berbeda di antara pria dan wanita berdasarkan tabiat mereka masing-masing, juga baerarti adanya keharusan pembagian tugas dalam rangka membangun masyarakat yang diinginkan, dan yang terpenting, harus diyakini adanya hukum-hukum tersebut justru untuk menjaga masyarakat agar di dalamnya terjadi kerja sama yang dilandasi kesucian dan ketakwaan, sehingga sangat naif jika masih ada orang yang memiliki pemahaman miring mengenai kedudukan perempuan dalam Islam atau memiliki gambaran bahwa perempuan Islam adalah perempuan yang jumud dan terkukung karena *Syara'*, memberikan keleluasaan kepada perempuan untuk melakukan aktifitas muamalat, memperoleh pendidikan yang tinggi, mengembangkan harta, berdakwah dan sebagainya, yang penting prin-

sip-prinsip aturan sosial tadi harus tetap ditegakkan dan lagi bukankah fatwa juga menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu berarti sama rata!

Melihat dari kenyataan itu kita punya harapan besar terhadap pilkada, mari kita lihat dampak dari proses pilkada secara lngsung terhadap aspek politik dan pemerintahan, hukum serta sosial-ekonomi.

Dampak positif pada aspek politik dan pemerintahan,

- a. Apabila pilkada secara langsung berjalan dengan sukses maka kehidupan politik yang demokratis di daerah akan dapat dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut akan memberi andil besar bagi terbangunnya sistem politis demokrastis secara nasional.
- b. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat karena prinsip kedaulatan di tangan rakyat dapat diwujudkan secara faktual, pemerintahan adalah bisnis kepercayaan dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka partisipasi akan lebih mudah digalang
- c. Partai politik sebagai alat untuk mengembangkan demokrasi akan memperoleh simpati dari rakyat.
- d. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh pemilih akan memiliki legitimasi kuat, sehingga tidak mudah digoyahkan, dengan pemerintahan yang stabil, tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi yakni

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan secara bertahap.

- e. Akuntabilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah baik administratif, yudikatif, politis dan terutama moral akan disampaikan langsung kepada masyarakat, dengan cara demikian ada dorongan yang kuat agar dana-dana publik yang dikelola pemerintah sebagian besar dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, bukan kepentingan birokrasi seperti yang selama ini terjadi
- f. Pada sisi yang lain karena merasa punya andil di dalam menentukan pemimpinnya sendiri, daya kritis masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat, sehingga makna pemerintahan demokratis yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat betul-betul dapat diwujudkan.
- g. Apabila birokrasi pemerintahan bersifat netral dalam arti tak memihak atau terpaksa harus memihak salah satu kontestan pilkada, sehingga salah satu prinsip negara demokrasi yakni "*public service neutrality*" dapat diwujudkan, maka secara bertahap kita dapat membangun birokrasi yang profesional. Indikasi ke arah itu telah ada antara lain dengan menempatkan SEKDA sebagai pembina PNS di daerahnya (pasal 122 ayat 4 UU nomor 32 tahun 2004) ataupun membangun organisasi fungsional bagi satuan polisi pamong praja (PP Nomor 32 tahun 2004

(menyusun Kamus Kompetensi Organisasi/KKO) Kamus Kompetensi Jabatan (KKJ) serta Kamus Kompetensi Individu (KKI).

Sedangkan dampak negatifnya :

- a. apabila pilkada secara langsung dilaksanakan secara tidak benar, tidak jujur dan penuh kecurangan maka rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada, sehingga akan terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya, dan bahkan konflik antar pendukung, untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis akan memerlukan waktu tenaga, dan biaya yang cukup besar, ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila pilkada dilaksanakan secara tidak benar
- b. legitimasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan terbatas, sehingga stabilitas pemerintahan akan mudah terganggu, tanpa pemerintahan yang stabil tidak akan ada investasi yang pada gilirannya tidak tercipta lapangan pekerjaan baru.
- c. Partai politik maupun tokohnya yang bermain tidak jujur dalam pilkada akan kehilangan dukungan dari konstituenya, karena hubungan emosional antara masyarakat dengan calon kepala daerah dan wakilnya sangatlah kuat dibanding hubungan emosional masyarakat dengan calon presiden dan wakil presiden.
- d. Hubungan emosional yang kuat antara calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah akan memudahkannya terjadinya konflik horizontal antara pendukung karena faktor primordial, termasuk isu tentang putra daerah, kampanye negatif, yang menyerang pribadi akan mengubah kompetensi perebutan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi konflik yang terbuka. Tanpa kebesaran jiwa dari semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan daerah, maka pilkada akan bersifat kontraproduktif terhadap pengembangan demokrasi.

- e. Apabila demokrasi bersifat tidak netral baik karena kemauan sendiri ataupun karena keadaan yang memaksa, maka akan terjadi politisasi birokrasi, yang membuat iklim dan budaya organisasi menjadi tidak sehat karena akan terbentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Pengisian jabatan lebih didasarkan pada kedekatan ideologi politiknya bukan karena kapasitas seseorang. Hal semacam itu akan membawa dampak pada penggunaan dana publik yang lebih banyak didasarkan pada perhitungan politik daripada kepentingan publik secara meluas.
- f. Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayananan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh mas-

alah yang sederhana, kalau dalam masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Sedangkan dampak pilkada langsung terhadap kemajuan daerah adalah :

- banyak sekali faktor yang menentukan kemajuan suatu daerah; ada faktor internal yakni faktor yang berada dibawah kendali manajemen, ada pula faktor eksternal, yakni faktor yang berada diluar kendali manajemen.
- Berkaitan dengan pilkada, ada tiga faktor penting yang berdampak langsung terhadap kemajuan daerah, yakni :
  - kapabilitas kepala daerah terpilih
  - dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di DPRD
  - "profesionalitas" birokrasi pemerintah daerah.

Dari urian diatas, baik dampak negatif dan positif dari pilkada tetap berimbas pada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, bila menyoroti keberadaan perempuan dalam berpolitik, perempuan harus memiliki kematangan terlebih dahulu dalam berpolitik, seperti yang kita tahu perempuan bagian integral dari rakyat usaha pematangan politik bagi rakyat mencakup juga pematangan poli-



tik bagi perempuan, namun karena kesenjangan yang begitu besar antara kesadaran berpolitik di kalangan laki-laki dan perempuan, menyebabkan pembahasan mengenai kematangan politik bagi perempuan memiliki urgensi tersendiri.

Perlu strategi atau metode untuk mematangkan politik perempuan di antaranya melalui pendidikan dan pembinaan politik perempuan, tujuannya tentu saja untuk membuat rakyat khususnya perempuan matang politik dan memiliki kesadaran politik yang shahih, pembinaan politik yang dimaksudkan yaitu membina ataupun kelompok wanita dengan cara memahami mereka dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam atau mengikuti peristiwa-peristiwa politik bukan hanya secara teori yang masih abstrak.

Adapun target dari pematangan politik perempuan, atau pendidikan politik bagi perempuan harus memiliki target yang antara lain: Pertama, memberikan pemahaman yang benar tentang politik dalam pandangan Islam ini untuk menghilangkan kesan bahwa politik adalah wilayah yang tidak ramah baik perempuan; Kedua, meningkatkan kesadaran politik perempuan mereka harus terlibat aktif mengikuti peristiwa-peristiwa politik, melakukan penelaahan dan mengambil sikap dengan menggunakan sudut pandang Islam; Ketiga, membentuk perempuan matang politik, yaitu perempuan yang selain disadari politik juga memiliki ketajaman analisis terhadap apa yang ada di berbagai peristiwa politik, dan perempuan

harus berjuang membantu saudara se-aqidah yang di-zhalimi atau ter-zhalimi.

Perjuangan menegakan kebenaran bagi kaum perempuan dapat saja dilakukan melalui lembaga perintah dengan mencalonkannya perempuan menjadi kepala daerah, walaupun demikian tantangan yang dihadapi sangat berat, tetapi saat ini banyak perempuan yang memburu posisi penting ini kendati tantangan sangat berat

Tetapi kenyataan sekarang para perempuan masih banyak yang merasa tidak puas dalam perangkat manajemen pemerintahan, tetapi perempuan ini pada kenyataan berada di posisi-posisi yang untuk membela kepentingannya bahkan seperti diuraikan di muka keanggotaan di DPR saja sebagai anggota dewan yang terhormat dari 30% cuman 11% yang terisi padahal perempuan mempunyai kepekaan sosial yang lumayan tinggi, dengan demikian perempuan pada umumnya menduduki jabatan yang membutuhkan kepekaan sosial dan keterampilan dalam membina hubungan antar pribadi yang lebih besar.

Tetapi karier yang memerlukan kepekaan sosial tentunya kurang menguntungkan bagi perempuan, untuk itu perlu adanya strategi perempuan yang dapat digunakan untuk jadi pimpinan puncak :

1. Meningkatkan dan memanfaatkan karakteristik perempuan, para perempuan dapat meningkatkan kualitas karakteristik perempuan sebagai dasar untuk meraih posisi pimpinan pun-

cak (kepala daerah), kepekaan sosial itu merupakan kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan. Karenanya pengembangan karier dapat dibangun di atas kekuatan tersebut. Para perempuan dapat mengembangkan pengetahuan khusus menggunakannya secara efektif untuk menanamkan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan laju pertumbuhan daerahnya.

2. menerapkan standar perilaku laki-laki, para perempuan dapat menyesuaikan dengan profil kepala daerah yang sukses di samping itu mereka dapat pula menerapkan stereotipe sifat pria sebagai standar perilaku pribadi mereka. Keberhasilan kepemimpinan perempuan untuk memadukan identitas seksual dan identitas kariernya secara harmonis.
3. menciptakan sistem jaringan kerja informal, dalam strategi ini perempuan berusaha meningkatkan kemampuannya sendiri, ini memakan waktu yang tidak sedikit, dalam strategi ini menganggap bahwa peningkatan kemampuan diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kemajuan politiknya.

## Penutup

Fungsi dari partai politik adalah pelayanan publik, pendidikan politik, dan perebutan kekuasaan. Hal ini tentunya dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mementingkan kepentingan masyarakat dalam persoalan kebutuhan kepentingan yang sifatnya umum. Pilkada saat ini sangat berpengaruh pada proses pilihan yang akan kita tentukan keberpihakan calon kepala daerah pada kepentingan publik pada persoalan agama persoalan soaisla kemasyarakatan dan keberpihakan pada masyarakat kecil ini menjadi sorotan kita persoalan persoalan di publik sangat syarat dari persoalan politik keberpihakan para calon pemimpin daerah sangat mempengaruhi para pemilih terutama pemilih perempuan dalam menyenukan sikap

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Husen, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKSI, Yogyakarta.
- Anshari, Dadang, S., 1997, *Membicarakan Feminisme*, Pustaka Hidayah, Bandung
- Saptari, Ratna, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Kalyanamitra
- Wasistiono, Sadu, 2005, *Analisis Dampak Pilkada Langsung*, Makalah Seminar Nasional.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? (QS. al-Nisa: 144)*